

## Survey Dampak Pelaksanaan MBKM di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Tahun 2021

Dewi Kurniasih<sup>1</sup>, Nia Karniawati<sup>2</sup>, Rino Adibowo<sup>3</sup>, Poni Sukaesih<sup>4</sup>, Tatik Fidowaty<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

<sup>1</sup>dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

### Abstract

*The Independen Learning Policy, students have the opportunity to be able to sharpen their abilities according to their interests and talents which are preparations for their future careers by directly entering the world of work. It is necessary to evaluate the implementation of the MBKM. This study aims to determine the economic and social impact of MBKM policies in the Government Science Study Program, FISIP Unikom. This study uses a survey method with a quantitative approach. The population is students who take part in the MBKM learning program as many as 84 people. The sampling technique uses saturated sampling in which all members of the population are sample. The results showed that 36.9% of respondents knew information about MBKM policies through the Unikom online channel/Unikom IP Study Program. The socialization both offline and online carried out by UNIKOM/IP UNIKOM Study Program was chosen by 29.1% of respondents. The form of MBKM learning activities outside the IP Unikom Study Program, as many as 66.7% chose internships/work practices. As many as 63.1% already know about the procedures and operational guidelines for MBKM policies. Learning activities increase competence outside of UNIKOM as much as 22.6% answered maybe. Regarding studying in other study programs, it can provide a variety of perspectives and additional competencies as much as 81% answered yes. As many as 60.7% answered that it was very useful to join the MBKM program. There is an increase in student soft skills after joining the MBKM program as much as 45.34%. Interest in the MBKM program as much as 52.4% answered very interesting. The conclusion is that the implementation of MBKM in department of Government Science of FISIP Unikom is able to become a special attraction, because it is able to improve the soft skills of students' competencies/skills, especially when dealing with the world of work after they graduate. It can be use as a provision for students to face the world of work after they graduate from college.*

**Keywords: Impact; Implementation; Policy; MBKM Program**

### Abstrak

Kebijakan merdeka belajar, mahasiswa berkesempatan untuk dapat mempertajam kemampuannya yang sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan persiapan karir masa depan dengan langsung terjun ke dunia kerja. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan MBKM secara ekonomi dan sosial di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran MBKM yaitu sebanyak 84 orang. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* dimana semua anggota populasi menjadi sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengetahui informasi tentang kebijakan MBKM melalui kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom sebanyak 36,9%. Sosialisasi baik luring maupun daring yang dilaksanakan oleh Unikom/Prodi IP Unikom dipilih responden sebanyak 29,1%. Bentuk

kegiatan pembelajaran MBKM di luar Prodi IP Unikom, sebanyak 66,7% memilih magang/praktek kerja. Sebanyak 63,1% sudah mengetahui mengenai prosedur serta panduan operasional kebijakan MBKM. Kegiatan pembelajaran menambah kompetensi di luar Unikom sebanyak 22,6% menjawab mungkin. Proses pembelajaran pada program studi lain dapat memberikan beragam perspektif serta tambahan kompetensi sebanyak 81% menjawab ya. Sebanyak 60,7% menjawab sangat bermanfaat mengikuti program MBKM. Terdapat peningkatan *softskill* mahasiswa setelah mengikuti program MBKM sebanyak 45,34%. Ketertarikan mengenai program MBKM sebanyak 52,4% menjawab sangat menarik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan MBKM pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom mampu menjadi daya tarik tersendiri, karena mampu meningkatkan *soft skill* kompetensi/keterampilan mahasiswa terutama pada saat berhadapan dengan dunia kerja setelah lulus sehingga dapat dijadikan bekal mahasiswa terutama kelak setelah lulus berhadapan dengan dunia kerja.

**Kata Kunci: Dampak; Pelaksanaan; Program MBKM**

### **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbudristek) republik Indonesia menyelenggarakan kampus merdeka dimana menjadi bagian dari kebijakan erdeka belajar. Penyelenggaraan kebijakan kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswinya agar dapat mengasah kemampuannya yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya sehingga menjadi persiapan bagi karir kedepannya. Kebijakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) mempunyai maksud yaitu memberikan pengalaman belajar baru yang menyenangkan serta relevan bagi mahasiswa dan juga dosen. Melalui kebijakan MBKM, Kemendikbudristek berupaya bagi mahasiswa menghadirkan simulasi dunia kerja kampus merdeka (Nadim Makarim, 2020). Program MBKM ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi pembelajaran dinamis, inovatif, dan fleksibel. Dan dari program inilah mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman belajar yang faktual yang sesuai dengan kebutuhannya di dunia kerja setelah menyelesaikan studinya. Melalui kebijakan MBKM, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan angka dari pengangguran nasional melalui sinkronisasi pendidikan dengan industri maupun dunia kerja. Setiap lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi lulusan yang memiliki kesiapan dalam bekerja yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini (Arifin & Muslim, 2020).

Menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia (Mendikbud Ristekdikti) Nadiem Anwar Makarim memberikan penjelasan bahwa pada untuk lingkup perguruan tinggi terdapat empat penyesuaian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Penyesuaian kebijakan tersebut yang pertama adalah otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk dapat membuka maupun mendirikan program studi (prodi) baru. Otonomi tersebut diberikan apabila PTN maupun PTS yang bersangkutan memiliki akreditasi A dan B. PTN maupun PTS tersebut juga telah menyelenggarakan program kerja sama dengan organisasi maupun universitas yang masuk dalam QS Top 100 *world universities*. Penyesuaian kebijakan yang kedua dari yaitu program re-akreditasi dimana sifatnya otomatis bagi semua peringkat serta sifatnya sukarela untuk perguruan tinggi maupun prodi yang telah siap untuk naik peringkat. Penyesuaian kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja (Satker) untuk menjadi PTN badan hukum (PTN BH). Kemendikbud memberikan kemudahan dalam persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Kebijakan yang keempat adalah diberikannya hak kepada

mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi serta melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (sks). Setiap perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Mahasiswa diperbolehkan mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Mahasiswa dapat mengambil sks pada program studi yang lain yang masih satu kampus sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Uraian di atas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan MBKM dimana menjadi suatu langkah awal bagi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk perguruan tinggi untuk dapat lebih mudah bergerak terutama sebagai dampak dari pandemi.

Kompetensi dari mahasiswa saat ini harus disiapkan semaksimal mungkin sebagai upaya menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik itu sosial maupun budaya. Selain itu mahasiswa memiliki kesiapan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin pesat serta dunia kerja yang beragam. Proses *link and match* dunia pendidikan tidak dilakukan dengan dunia industri serta dunia kerja saja. Diperlukan untuk kedepannya dari mahasiswa itu sendiri dimana mengalami perubahan sangat cepat. Setiap perguruan tinggi pada akhirnya dituntut untuk mampu merancang berbagai kebijakan sebagaimana arahan dari pemerintah dengan menjalankan program pembelajaran yang bersifat inovatif. Hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai proses belajar yang mencakup banyak aspek.

Kebijakan MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti tentunya diharapkan menjadi jawaban terhadap tuntutan yang ada. Kampus merdeka sendiri menjadi salah satu wujud dari pembelajaran di perguruan tinggi yang bersifat otonom serta mampu menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Perguruan tinggi mampu menciptakan budaya belajar yang memiliki inovasi yang tinggi dan tidak mengekang serta disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kebijakan MBKM diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dalam menyongsong berbagai transformasi (Mulyana *et al.*, 2022). Pelaksanaan kebijakan MBKM memiliki kebermanfaatannya yang cukup tinggi terutama dalam pengembangan pengetahuan maupun keterampilan dari mahasiswa sebagai modal setelah lulus nantinya (Sulistiyani *et al.*, 2022).

Pelaksanaan kebijakan MBKM bagi mahasiswa memberikan beragam kesempatan diantaranya dalam mendapatkan berbagai pengalaman baru dengan beragam kompetensi. Hal tersebut diperoleh dari beberapa proses pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, riset, praktik kerja maupun magang, proyek independen, sebagai asisten dosen yang mengajar pada satuan pendidikan, kewirausahaan, serta kuliah kerja nyata yang bersifat tematik. Melalui Kebijakan MBKM, mahasiswa diberi kebebasan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studinya tetapi masih pada perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu (Bagus Endrawan *et al.*, 2021). Kegiatan yang diselenggarakan dalam MBKM memerlukan bimbingan dari dosen pembimbingnya dimana dosen tersebut mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya kepada mahasiswa bimbingannya (Soeharso, 2021). Pelaksanaan kebijakan MBKM memberikan pengalaman secara kontekstual di lapangan. Pengalaman tersebut dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa secara utuh sehingga memiliki kesiapan kerja bahkan mampu membangun lapangan kerja yang baru melalui kegiatan kewirausahaan. Proses pembelajaran dalam MBKM menjadi suatu wujud pembelajaran dimana berpusat kepada mahasiswa yang bersifat utama. Proses pembelajaran bagi mahasiswa dalam program MBKM diberikan kesempatan serta tantangan dalam rangka pengembangan kepribadian, kreatifitas, kapasitas, inovasi, serta kebutuhan mahasiswa. Selain itu mahasiswa mampu mengembangkan kemandiriannya dalam menemukan pengetahuan melalui dinamika di lapangan.

Kebijakan MBKM hal terbilang masih baru sehingga akan memberikan dampak yang signifikan baik untuk kampus maupun bagi mahasiswanya. Penafsiran yang beragam terhadap apa itu MBKM, masih menjadi perbincangan yang hangat, begitu juga dengan kondisi mahasiswanya. Pemahaman terhadap kebijakan MBKM masih belum optimal, sehingga belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu melihat kondisi seperti dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa memahami kebijakan MBKM? bagaimana manfaat dari diimplementasikannya kebijakan MBKM? dan bagaimana minat mahasiswa atas program MBKM tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui survei berkaitan dengan kebijakan MBKM tersebut dengan memberi judul penelitian ini survei dampak pelaksanaan MBKM di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom Tahun 2021.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode *survey*. Penelitian ini mempunyai populasi yaitu mahasiswa program pembelajaran MBKM berjumlah 84 orang. Sementara tehnik penentuan sample menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh sendiri menempatkan semua populasi menjadi anggota sampel, sehingga sampel yang diambil sejumlah populasi. Teknik pengumpulan data serta informasi terkait penelitian dilakukan melalui studi lapangan serta studi pustaka. Pelaksanaan studi pustaka melalui pengumpulan berbagai macam data terkait data sekunder dengan pelaksanaan MBKM. Studi lapangan dilakukan dengan penyebaran angket atau kuisisioner (*self-administered questionnaire*) melalui website spadatikti.

Penelitian ini dilaksanakan di kampus Unikom terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, karena bukan bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini terbatas pada menggambarkan objek serta situasi yang akan diteliti. Dalam menganalisa, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yang didasarkan pada data yang dihasilkan dari proses *survey* serta dokumentasi. Tahapan analisa data berawal dari telaahan semua data yang didasarkan dari berbagai sumber serta dokumen yang berhubungan dalam penelitian serta hasil *survey*. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan berbagai temuan di lapangan secara sistematis dan sederhana. Setelah data seluruh responden terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Kegiatan analisis data dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu *editing*, *coding* dan *tabulating*. Proses *editing* dilakukan untuk memeriksa apakah kuesioner yang di isi responden di spada dikti telah mencakup kelengkapan pengisian angket. Pada proses *coding*, dilakukan pembobotan untuk masing-masing item pernyataan dalam angket. Sedangkan pada tabulasi data, dilakukan pengelompokkan jawaban dari responden yang sejenis baik secara teratur dan sistematis.

Angket sendiri dibuat dengan sistem tertutup, terbuka, dan semi tertutup terbuka, hal tersebut berarti bahwa setiap tanggapan bagi responden untuk setiap pernyataan telah disediakan. Kolom jawaban telah tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing responden dengan bobot nilai 1 untuk masing-masing jawaban. Pengolahan data didasarkan hasil jawaban dari responden. Kemudian dideskripsikan dan diverifikasi, informasi yang diberikan responden telah sesuai dengan yang sebenarnya di lapangan. Untuk mengetahui setiap indikator termasuk ke dalam suatu kategori, jumlah yang dihasilkan dari tabulasi data diolah dengan cara menghitung prosentase (%).

## **Hasil dan Pembahasan**

Kata merdeka berarti: 1) bebas, berdiri sendiri; 2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan; 3) tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu (badan pengembangan bahasa dan perbukuan, 2016). Arti kata belajar sendiri yaitu proses mental

yang terjadi pada diri seseorang, dimana proses tersebut berakibat pada munculnya perubahan perilaku dari orang tersebut (Sanjaya, 2010). Belajar adalah proses dari perubahan individu dimana terjadi karena suatu pengalaman. Proses belajar bukan dikarenakan oleh tumbuh dan kembang dari tubuh seseorang maupun karakteristik yang dimiliki ketika dilahirkan (Trianto, 2010). Proses belajar merupakan proses dari adanya perubahan pada tingkah laku seseorang. Perubahan tersebut bersangkutan dengan perubahan pengetahuan serta keterampilan seseorang demikian pula dengan perubahan sikapnya yang diperoleh melalui pengalaman yang dialaminya serta dilakukannya pelatihan (Djamarah dan Zain, 2010).

Merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah memberikan kesempatan untuk belajar yang nyaman serta bebas bagi mahasiswa. Proses belajar dilakukan dengan santai, tenang serta gembira. Merdeka belajar dilaksanakan untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa serta tekanan yang diberikan. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan setiap bakat alami yang dimiliki oleh mahasiswa, tanpa adanya paksaan. Setiap mahasiswa mempelajari bidang pengetahuan yang sesuai dengan hobi serta kemampuan yang di miliki. Masing-masing mahasiswa mampu tumbuh serta berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Sejalan dengan pendidikan tinggi bahwa MBKM sebagaimana Nadiem Makarim sampaikan, bahwa konsep awal dari merdeka belajar merupakan inspirasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara yang menekankan kepada kemerdekaan dan kemandirian. Pendefinisian dari kata merdeka disini penerapannya dalam proses pendidikan perkuliahan di perguruan tinggi. Setiap mahasiswa yang mengambil program MBKM dapat memilih salah satu dari delapan program merdeka belajar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Thomas Dye mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan *whatever governments choose to do or not to do* (Dye, 1978). Sebagaimana ungkapan Dye bahwa kebijakan MBKM merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu upaya dalam perbaikan sistem pembelajaran di Indonesia yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dilaksanakan agar mahasiswa memiliki kesiapan serta kemampuan untuk berdaya saing terutama di dunia kerja. Sebagaimana pemikiran yang dijelaskan oleh Lasswell dan Kaplan dimana melihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sarana untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik itu nilai maupun praktiknya (Said zainal A., 2012). Kebijakan menjadi sebuah panduan untuk tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki hasil yang diinginkan (Kurniasih, 2022). Kebijakan MBKM diimplementasikan dalam rangka memperoleh lulusan dari perguruan tinggi yang disesuaikan dengan berkembangnya jaman, tuntutan dari dunia industri dan dunia usaha, kemajuan IPTEK, serta berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut diharapkan lulusan PT memiliki kesiapan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keunggulan di masa depan serta memiliki kepribadian yang sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimilikinya serta relevan dengan kebutuhan jaman (Puspitasari & Nugroho, 2021). Untuk mengetahui implementasi kebijakan MBKM ini telah tersampaikan kepada mahasiswa dan perguruan tinggi, dibahas beberapa hal berikut:

## **1. Sejauhmana Mahasiswa Memahami Kebijakan MBKM**

Menteri Ristekdikti Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa kebijakan kampus merdeka adalah tindak lanjut dari konsep merdeka belajar. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Kebijakan MBKM hanya mengubah peraturan menteri. Keberhasilan dari implementasi kebijakan MBKM terlihat dari pemahaman terhadap kebijakan itu sendiri. Melalui survei yang di lakukan secara intern pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Unikom Bandung mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan MBKM terlihat dari table berikut:

Tabel 1. Tanggapan responden pemahaman mahasiswa tentang kebijakan MBKM

No	Tanggapan	F	%
1	Mengetahui Kebijakan secara keseluruhan	4	4,8
2	mengetahui sebagian besar isi kebijakan	28	33,3
3	mengetahui sedikit	48	57,1
4	belum mengetahui sama sekali	4	4,8
		84	100,0

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 57,1% mahasiswa sedikit mengetahui tentang isi kebijakan MBKM itu sendiri. Hal ini tentunya terjadi karena kebijakan MBKM merupakan kebijakan yang baru saja diimplementasikan, jadi belum semua mahasiswa mengetahui seluruh isi kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden pada umumnya hanya tahu tentang lahirnya kebijakan MBKM dan sebagian programnya, tetapi belum membedah terkait kebijakan MBKM ini secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kembali mengenai kebijakan tersebut pada jenjang pendidikan sebelumnya, sehingga ketika menginjak perguruan tinggi, siswa telah memahami mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi di tingkat kampus/atau perguruan tinggi khususnya di Unikom, pihak kampus telah mendukung kebijakan tersebut dengan mensosialisasikan kepada mahasiswa. Melalui sosialisasi, pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan MBKM menjadi lebih banyak. Sosialisasi dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh lingkungan kampus, baik melalui kegiatan sosialisasi oleh kampus, maupun informasi yang disediakan secara daring oleh pihak kampus.

## 2. Sumber Media Memperoleh Informasi Mengenai Kebijakan MBKM

Di era digital bukanlah menjadi perkara yang sulit untuk mendapat suatu informasi berkaitan dengan apapun. Jejaring internet dapat menjadi salah satu memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan pada survei yang dilakukan secara intern di Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom, maka diperoleh hasil *survey* sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan responden sumber informasi mengenai kebijakan MBKM

No	Tanggapan	F	%
1	Kanal Daring Kemendikbud	10	11,9
	Kegiatan sosialisasi luring/daring		
2	yang diselenggarakan Kemendikbud	7	8,3
3	Kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom	31	36,9
4	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Unikom/Prodi IP Unikom	29	34,5
5	Kanal komunikasi komunitas	7	8,3
		84	100,0

Berdasarkan tabel di atas, jelas tergambar bahwa 36,9 persen mahasiswa memperoleh informasi dari kanal daring Program Studi Ilmu Pemerintahan dan 34,5 % melalui sosialisasi yang dilakukan baik secara luring ataupun daring oleh Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom. Hal ini memberikan gambaran bahwa peran program studi Ilmu Pemerintahan atau secara umum Unikom mampu memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh mahasiswa mengenai kebijakan MBKM tersebut. Penggunaan media dalam penyampaian informasi tentang kebijakan MBKM mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan penyebaran informasi kebijakan MBKM. Agar tujuan penyebaran informasi tentang kebijakan MBKM ini maksimal diperlukan pemilihan media yang tepat. Salah satu terlaksananya suatu kebijakan dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi yang tepat (Kurniasih *et al.*, 2013) dimana disini adanya media informasi yang tepat dalam penyelenggaraan kebijakan MBKM. Kebutuhan informasi yang telah disampaikan ini akan berdampak juga kepada pemahaman mahasiswa mengenai implementasi kebijakan MBKM. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah:

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Media Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Kebijakan MBKM

No	Tanggapan	F	%
1	Kanal Daring Kemendikbud	31	14,6
2	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Kemendikbud	53	24,9
3	Kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom	54	25,4
4	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Unikom/Prodi IP Unikom	62	29,1
5	Kanal komunikasi komunitas	13	6,10
		213	100,0

Dari data yang disajikan oleh table 3, bahwa 14,6% mahasiswa menyatakan kanal daring kemendikbud telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan MBKM. 24,9% mahasiswa menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi baik luring maupun daring yang diselenggarakan kemendikbud telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap kebijakan MBKM, 25,4% mahasiswa menyatakan bahwa kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap kebijakan MBKM, dan 29,1% mahasiswa menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Unikom/Prodi IP Unikom sebagai media memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan kebijakan MBKM, serta 6,10% mahasiswa menyatakan bahwa kanal komunikasi komunitas telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan kebijakan MBKM.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara luring maupun daring oleh kemendikbud telah memberikan andil terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan MBKM, di susul oleh peran dari kampus Unikom sebagai tempat implementasi dari kebijakan MBKM tersebut akan dilaksanakan. Pemahaman mahasiswa baik akan kebijakan MBKM, ini akan memberikan ruang kemudahan didalam menindaklanjuti kedepannya terhadap kebijakan MBKM, berkaitan dengan implementasi kebijakan MBKM, program hak belajar di luar program studi tiga semester, memiliki persyaratan umum bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan program MBKM yaitu: 1) program studi sudah terakreditasi; 2) program studi telah ada dalam daftar PDDikti bagi mahasiswa yang aktif.

Setelah mengetahui informasi mengenai kebijakan MBKM dan memahaminya, maka hal ini akan mampu membantu mahasiswa dalam menentukan langkah berikutnya, yaitu dalam melaksanakan kegiatan belajar bagi mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 diperoleh bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi yaitu:



Gambar 1. Bentuk kegiatan pembelajaran

Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar - Kampus merdeka

Berpedoman pada buku panduan Merdeka belajar-Kampus merdeka, maka untuk memudahkan pihak Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, melalui *survey* dapat diperoleh data yang digambarkan berikut ini:

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Pemilihan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Luar Prodi IP Unikom

No	Tanggapan	F	%
1	Pertukaran pelajar	13	15,5
2	Magang/praktek kerja	56	66,7
3	Asisten mengajar di satuan pendidikan	5	6,0
4	Penelitian/riset	1	1,2
5	Studi kemanusiaan	2	2,38
6	Kegiatan wirausaha	7	8,3
		84	100,0

Berdasarkan tabel 4 tersebut jelas tergambar bahwa sebagian besar minat siswa dalam mengikuti atau melaksanakan implementasi MBKM, para mahasiswa menaruh minatnya 66,7% untuk mengikuti magang/praktek kerja di luar kampus, sehingga hal ini akan sangat membantu pihak kampus untuk menentukan langkah kebijakan yang akan diambil dan tidak terlepas dari koridor kebijakan MBKM. Kebijakan MBKM berupaya untuk memberikan dorongan terhadap pengembangan minat kewirausahaan dari mahasiswa melalui kesesuaian program kegiatan belajar. Salah satu upaya dalam peningkatan dari mutu lulusan adalah melalui adaptasi kegiatan magang usaha. Adaptasi tersebut terutama dalam kurikulum program studi dapat membuat mahasiswa memiliki kesiapan untuk dapat bersaing serta dapat menciptakan peluang usaha terutama pada era digital seperti saat ini (Baharuddin, 2021)

Setelah mendapatkan telaahan mengenai peminatan para mahasiswa tersebut di atas, makah langkah selanjutnya dari pihak kampus yaitu dengan penyusunan dari kebijakan serta manual mutu perguruan tinggi. Selanjutnya adalah penetapan mutu perguruan tinggi terutama dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Kebijakan kampus dalam menunjang kebijakan MBKM tersebut, terlihat pada hasil *survey* berikut:



Tabel 5. Tanggapan Responden Ketersediaan Dokumen Kurikulum, Panduan Dan Prosedur Operasional Untuk Mengikuti Kegiatan MBKM di Prodi IP Unikom

No	Tanggapan	F	%
1	Sudah	53	63,1
2	Belum	2	2,38
3	tidak tahu	29	34,5
		84	100,0

Dari gambaran diatas, dapat ditafsirkan bahwa program studi ilmu pemerintahan melengkapi dokumen kurikulum, panduan serta prosedur operasional dalam rangka mendukung program MBKM, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan telah siap menunjang kebijakan MBKM sesuai dengan arahan dan intruksi dari pemerintah. Dinamika yang terjadi saat ini tentu saja dimanfaatkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan dengan melakukan revitalisasi kurikulum. Revitalisasi kurikulum yang berbasis MBKM tertuang melalui dokumen kurikulum. Hal ini tentunya dengan harapan program studi mampu untuk mengakomodasi dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 (Hudjimartsu *et al.*, 2022).

### 3. Kebermanfaatan Kebijakan MBKM

Kebijakan yang utama dari program MBKM yaitu memudahkan dalam membuka program penelitian yang baru. Selain itu adanya perbaikan daripada skema akreditasi pada perguruan tinggi. Mudahnya PTN dapat menjadi PTN terintegrasi, serta diberikannya kepada mahasiswa kebebasan untuk dapat belajar di luar program studinya dalam kurun waktu tiga semester (Darajatun & Ramdhany, 2021). Kebijakan MBKM melaksanakan pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan diluar program studi. Hak untuk mengikuti perkuliahan di program studi lain se-Unikom akan memberikan wawasan tambahan berkaitan dengan bidang ilmu lain. Hak untuk mengikuti perkuliahan di luar Unikom akan memberikan wawasan yang lebih luas lain. Keragaman ilmu, latar belakang sosial budaya mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut akan memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa. Manfaat ini akan dirasakan langsung oleh mahasiswa, karena tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak kampus. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menentukan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebijakan MBKM. Sebagaimana hasil *survey* yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP unikom terhadap mahasiswanya, yaitu:

- a. Pelaksanaan Kebijakan MBKM oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom memberikan kompetensi tambahan.

Program MBKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Program MBKM merupakan program yang dalam pelaksanaannya menciptakan kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang merupakan indikator dari IKU. Kontribusi pelaksanaan program MBKM terhadap sektor lain ditinjau dari pemahaman bahwa pelaksanaan program MBKM di Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom dapat memberi kompetensi tambahan kepada lulusan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom berupa 1) keterampilan dalam menyelesaikan masalah; 2) memperluas perpektif; 3) meningkatkan soft skill; 4) sebagai bekal untuk bekerja; 5) persiapan sesudah lulus. Kemudian akan mengkaji Program MBKM sebagai kebutuhan lulusan dimasa depan. Jawaban ini akan tergambar dari hasil *survey* yang ditunjukkan oleh tabel 6 berikut:

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Pembelajaran di Luar Unikom Memberikan Kompetensi Tambahan Seperti Keterampilan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nyata yang Kompleks, Keterampilan Dalam Menganalisis, Etika Profesi Dan Lain-Lain

No	Tanggapan	F	%
1	Ya	63	75
2	Mungkin	19	22,6
3	Tidak tahu	2	2,4
		84	100

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dengan adanya kegiatan pembelajaran di luar Unikom 75% mahasiswa yang menjadi responden menyatakan ya, bahwa pembelajaran diluar Unikom, tentu saja mampu memberikan tambahan kompetensi. Beberapa kompetensi tersebut adalah keterampilan dalam menganalisis suatu permasalahan, keterampilan dalam menyelesaikan setiap masalah, dan bertambahnya kompetensi dalam etika profesi. Dampak dari adanya kebijakan MBKM bagi mahasiswa setiap proses perkuliahan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, mahasiswa memiliki beragam pengalaman saat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan dapat menjadi modal untuk siap kerja setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi (Laga *et al.*, 2022).

b. Pelaksanaan Kebijakan MBKM oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom perspektif yang Luas Serta Kompetensi Tambahan

Gambaran dari hasil *survey* yang ditunjukkan oleh tabel 7 jelas bahwa dengan belajar di luar kampus, mendapatkan perspektif yang lebih luas serta mendapatkan tambahan kompetensi yang tentunya dibutuhkan mahasiswa kelak setelah selesai menempuh jenjang pendidikan tinggi disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Tanggapan Responden Tentang Pembelajaran Di Program Studi Lain Dapat Memperluas Perspektif Dan Memberikan Kompetensi Tambahan

No	Tanggapan	F	%
1	Ya	68	81,0
2	Mungkin	15	17,9
3	tidak tahu	1	1,2
		84	100,0

Harapan dari kebijakan MBKM adalah adanya kebebasan bagi setiap mahasiswa MBKM untuk menentukan mobil pembelajarannya, sehingga mahasiswa dapat atau mampu menjawab tantangannya setelah menempuh pendidikan tinggi. Pada tabel 7 yang merupakan gambaran dari responden tentang pengalamannya belajar diluar kampus, dengan program studi lain mendapatkan berbagai perspektif yang luas serta mendapatkan tambahan kompetensi. Hasil *survey* menunjukkan 81,0% mahasiswa menyatakan bahwa dengan pembelajaran di program studi lain ternyata dapat perspektif sebagai mahasiswa dapat menjadi luas serta mendapatkan tambahan kompetensi yang dibutuhkan.

Hak belajar yang diperoleh oleh mahasiswa diluar program studi selama tiga semester. Hak tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah untuk mempersiapkan kompetensi dari mahasiswa terutama dalam menghadapi berbagai perubahan. Kompetensi mahasiswa tersebut haruslah dilakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman yang tentunya selalu mengalami perubahan untuk masa depan (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Kampus merdeka menjadi suatu wujud pembelajaran di perguruan tinggi dimana bersifat luwes serta independen sehingga tercipta budaya belajar yang tidak ada pengekanan serta

lebih bersifat inovatif, serta disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa (Suwandi, 2020) (Sopiansyah *et al.*, 2022).

c. Kebijakan MBKM Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bermanfaat dalam Mengembangkan Kompetensi Maupun Keterampilan Sebagai Bekal Bekerja

Karena kebijakan MBKM tidak hanya menyoal kepentingan mahasiswa saja, tetapi juga kampus sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi dan yang akan memfasilitasi mahasiswa memperoleh hak belajarnya. Oleh karena itu, melalui survei ini juga tergambar bahwa apakah kebijakan kampus menunjang apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan MBKM. Pada tabel 8 merupakan hasil survei yang menggambarkan manfaat kegiatan MBKM apakah mampu menjadi bekal mahasiswa setelah lulus di perguruan tinggi, dengan kata lain mampu menjadi bekal kerja.

Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Manfaat MBKM dalam Mengembangkan Kompetensi/Keterampilan Sebagai Modal Bekerja

No	Tanggapan	F	%
1	Sangat bermanfaat	51	60,7
2	Cukup bermanfaat	33	39,3
3	Tidak bermanfaat		
4	Kurang bermanfaat		
		84	100,0

Tabel 8 di atas diperoleh pandangan yaitu mahasiswa sebesar 68,7% yang menyatakan sangat bermanfaat berkaitan dengan kebermanfaatannya apabila mahasiswa mengikuti program MBKM dalam rangka mengembangkan kompetensi maupun keterampilan yang dapat menjadi bekal bekerja setelah lulus. Sebanyak 39,3% mahasiswa menyatakan cukup bermanfaat, hal ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa meyakini kegiatan MBKM memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi maupun keterampilan mampu menjadi bekal bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Tantangan dan kesempatan belajar diberikan kepada mahasiswa dalam kebijakan MBKM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung (Tohir, 2020).

Implementasi kebijakan MBKM menjawab berbagai tantangan yang terjadi kedepannya sebagaimana teknologi yang berkembang. Hal tersebut mampu menciptakan lulusan yang fokus pada pencapaian pembelajaran yang sebanding disesuaikan dengan disiplin ilmu. Pelaksanaan kebijakan MBKM yang utama adalah terasahnya kemampuan *soft skill* mahasiswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *survey* terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang Besarnya Peningkatan *Soft-Skill* Setelah mengikuti MBKM dalam Mengembangkan Kompetensi Sebagai Modal Bekerja

No	Tanggapan	F	%
1	tidak ada peningkatan sama sekali	5	5,95
2	ada peningkatan tapi kurang baik	1	1,2
3	ada peningkatan cukup baik	38	45,24
4	ada peningkatan dengan baik	27	31,1
5	ada peningkatan dengan sangat baik	13	15,5
		84	100,00

Tabel di atas diperoleh gambaran berkaitan besarnya peningkatan dari *soft-skill* mahasiswa terutama setelah mahasiswa mengikuti program MBKM terutama dalam mengembangkan kompetensinya serta keterampilannya yang menjadi modal bekerja,

sebanyak 45,24% mahasiswa menyatakan terdapat peningkatan yang cukup baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengikuti program atau kegiatan MBKM mahasiswa mampu meningkatkan *soft-skill* dalam pengembangan baik kompetensi maupun keterampilan sebagai modal bekerja. Tujuan dari implementasi kebijakan MBKM adalah peningkatan dari kompetensi lulusan perguruan tinggi. Baik dari *soft skills* mahasiswa maupun *hard skills* yang dimiliki mahasiswa. Hal tersebut agar mahasiswa memiliki kesiapan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan jaman. Setiap program yang dilaksanakan dengan *experiential learning* melalui alur yang bersifat lebih fleksibel dengan harapan mahasiswa mampu mendapatkan fasilitasi pengembangan potensi yang sesuai dengan minat maupun bakatnya (Dirjendikti, 2020).

#### 4. Minat Mahasiswa Terhadap MBKM

Kebijakan MBKM yang dilaksanakan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom ini akan memberi pengalaman pembelajaran kepada seluruh mahasiswa. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan MBKM. Mahasiswa merupakan objek dari Program MBKM. Pengetahuan, pemahaman, ketertarikan dan keikutsertaan mahasiswa merupakan penentu keberhasilan program MBKM. Untuk itu perlu ada upaya yang dilakukan oleh program studi dalam mengambil minat dari mahasiswa untuk turut serta dalam program MBKM. Bersarnya ketertarikan ataupun minat dari mahasiswa dapat terlihat tabel berikut:

Tabel 10. Tanggapan Responden Mengenai Ketertarikan Mahasiswa Tentang Program MBKM

No	Tanggapan	F	%
1	Sangat menarik	44	51,4
2	Biasa saja	37	44,0
3	Tidak tertarik	3	3,6
		84	100,0

Dengan diimplementasikannya kebijakan MBKM oleh program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, ternyata hal ini menjadi sebuah daya tarik bagi mahasiswa untuk mengeksplor kemampuan dirinya dengan belajar di luar unikom baik itu di program studi yang lain atau program magang. Hal ini tergambar dari hasil survei pada tabel 10 di atas, dimana ketertarikan mahasiswa tentang program MBKM sebesar 52,4 %, cukup menggambarkan atensi mahasiswa terhadap ketertarikannya dalam berpartisipasi pada kegiatan program MBKM di prodi lain di luar kampus unikom. Penelitian ini tentu saja mengharapkan hasil bahwa persepsi dari mahasiswa yang optimis dalam pelaksanaan program MBKM dimana menjadi sebuah landasan dalam pengembangan program pembelajaran yang lebih optimal. Dosen berperan mendampingi serta mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan MBKM (Yuliasari *et al.*, 2022).

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari dampak dari adanya kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom mampu menjadi daya tarik tersendiri, karena dengan diimplementasikan kebijakam MBKM mampu meningkatkan *soft skill* kompetensi/keterampilan mahasiswa terutama berhadapan dengan dunia kerja setelah lulus, dengan kata lain bahwa pelaksanaan program MBKM dapat dijadikan bekal mahasiswa terutama kelak setelah lulus berhadapan dengan dunia kerja.

## Daftar Pustaka

- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka belajar, Kampus merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1), 1–11.
- Bagus Endrawan, I., Hardiyono, B., Haris Satria, M., & Kesumawati, S. A. (2021). Pengembangan Kurikulum Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) Program Studi Pendidikan Olahraga Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa Universitas Bina Darma. *JPKMBD (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma)*, 1(2), 180–186.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka belajar Kampus merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa. *Journal of Business Management Education*, 6(3), 11–21.
- Djamarah, Syaipul Bahri dan Aswan Zain. (2010). *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hudjimartsu, S. A., Prayudyanto, M. N., Sutisna, S. P., & Heryansyah, A. (2022). Peluang Dan Tantangan Implementasi Merdeka belajar. *Educate (Jurnal Teknologi Pendidikan)*, 7(1), 58–70.
- Kurniasih, D. (2022). *Policy Strategy for Increasing The Capacity of Human Resources Leaders of The DPRD Members of Bandung Regency*. 2(102), 7–14.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6–14.
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699–706.
- Mulyana, Wahyudin, Y., Lesmana, D., Mumpuni, F. S., & Farastuti, E. R. (2022). Evaluasi Dampak Program Merdeka belajar Kampus merdeka ( MBKM ) pada Bidang Studi Akuakultur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1551–1564.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Governance*, 11(2), 276–292.
- Said zainal A. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sanjaya, Wina. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka belajar Kampus merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka belajar Kampus merdeka ). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 260–279.
- Sulistiyani, E., Khamida, Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., Putra, R. S., Budiarti, R. P., & Andini, A. (2022). Implementasi Merdeka belajar Kampus merdeka ( MBKM ) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 686–698.



- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka belajar-Kampus merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020, pp 1-12.
- Tohir, M. (2020). Buku Panduan Merdeka belajar—Kampus merdeka.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Inovatif-Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Yuliasari, I., Zubaedah, I., & Permatasari, M. A. (2022). Pola Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Sosialisasi dan Implementasi Program Merdeka belajar Kampus merdeka di Universitas Jayabaya. *Jurnal Citra Fikom Jayabaya*, 10(1), 1–9.